



ANALISIS KONSEP PEMIMPIN IDEAL DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI (AT-TIBRU MASBUK FII NASHIHATI AL-MULUK)

Erna Yunita¹, Saiful Falah², Milahtul Latifah³

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor^{1 2 3}

yerna8586@gmail.com

ABSTRAK

Seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang efektif. Tujuan yang dimiliki oleh seluruh pemimpin sama, yakni mampu membimbing masyarakat kehidupan yang lebih baik dan membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di organisasi atau masyarakat. Metodologi penelitian memakai metode kualitatif Kajian Pustaka secara sistematis relevansi data yang ditentukan. Sumber data primer *At-Tibru Masbuk Fii Nashihati Al-muluk* karya Imam Al-ghazali dan sumber data sekunder karya yang masih berkesinambungan. Seorang pemimpin secara Islam, bahwasanya kriteria pemimpin ideal, yaitu: memiliki pengetahuan, kesempurnaan panca indera, kemampuan, dewasa, laki-laki, progresif, merdeka, keadilan, mendahului orang yang bertaqwa. Seorang pemimpin menurut Imam Al-Ghazali terdapat 1) Pokok Keimanan, 2) Pokok Keadilan mencakup Pokok keadilan, tidak berbuat zalim, dekat dengan ulama, mendidik, jangan sombong, jangan berkhianat, jangan mengabaikan kebutuhan masyarakat, jangan serakah, tidak otoriter, mencintai agamanya, tidak mencari keridhaan rakyat yang tidak sesuai dengan ajaran syariat. *Collaborative governance* dalam pemberantasan tindak kasus korupsi di Indonesia yang dibutuhkan kerjasama terstruktur antara institusi pemerintah, swasta dan masyarakat melalui *personal dialog, trust building, commitment to the process, mutual understanding, intermediate results*.

Kata Kunci: Konsep, Pemimpin Ideal, Perspektif Imam Al-Ghazali.

ABSTRACT

A leader must be an effective leader. The goal shared by all leaders is the same, which is to be able to guide people to a better life and help solve problems in the organization or community. The research methodology uses the qualitative method of Literature Review systematically the relevance of the data determined. The primary data source of *At-Tibru Masbuk Fii Nashihati Al-muluk* by Imam Al-Ghazali and the secondary data source of the work are still continuous. An Islamic leader, that is the criterion of an ideal leader, namely: having knowledge, perfection of the five senses, ability, maturity, male, progressive, independent, justice, ahead of the pious person. A leader according to Imam Al-Ghazali there are 1) Principles of Faith, 2) Points of Justice include the Points of justice, not committing tyranny, being close to scholars, educating, not being arrogant, not betraying, not ignoring the needs of society, not greedy, not authoritarian, loving his religion, not seeking the pleasure of the people who are not in accordance with the teachings of the Shari'a. Collaborative governance in eradicating corruption cases in Indonesia requires structured cooperation between government, private and community institutions through personal dialogue, trust building, commitment to the process, mutual understanding, intermediate results.

Keywords: The concept, the ideal leader, the perspective of Imam al-Ghazali.



PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam Islam adalah ketika tindakan dan kekuatan bersatu, pemimpin yang utama dari kepemimpinan adalah persatuan. Dengan mengembangkan otoritas Islam sebagai contoh harus menjadi ide, bahwa otoritas didasarkan pada kekuatan yang terakhir melalui kesatuan visi keimanan, kemasyarakatan, politik, ekonomi, peraturan dan adat istiadat. Keunggulan sebagai ketua dalam urusan agama, politik, ketatanegaraan, ekonomi, peraturan dan kebudayaan merupakan harapan bangsa. Perkembangan zaman saat ini telah bermunculan seorang pemimpin diberbagai lapisan masyarakat, dengan pemimpin spritual, pemimpin agama maupun pemimpin negara. Tujuan yang dimiliki oleh seluruh pemimpin sama, yakni mampu membimbing masyarakat kehidupan yang lebih baik dan membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di organisasi atau masyarakat. (Joko Widodo: 2022, hlm. 30)

Konsep pemimpin Islam mempunyai landasan yang sangat kokoh serta kuat, tidak hanya dibentuk setiap prinsip-prinsip tentang Islam, tetapi Nabi Muhammad SAW, para Sahabatnya dan Al-khulafaa al-Raasyidiin telah melakukannya selama bertahun-tahun, yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan meningkat pesat karena kondisi sosial, budaya dan politik yang mempengaruhinya. (Ahmad Rofi'i: 2021, hlm. 70-81)

Kepemimpinan dalam ajaran Islam berarti memimpin, mengarahkan, dan menunjukkan jalan kepada Allah SWT. Tujuan dari kepemimpinan ini adalah untuk membantu orang lain yang memimpin mencapai Allah SWT ada di dunia dan di akhirat. (Milahtul Latifah: 2022, hlm. 02)

Meskipun banyak orang Indonesia yang menjadi pemimpin, mereka hanya sedikit yang memahami apa itu kepemimpinan. Sebagian besar pemimpin Indonesia menggunakan kepemimpinan sebagai cara untuk memperkaya diri dan memperluas kekuasaan mereka. Rakyat adalah inti dari kepemimpinan, tetapi pemimpin melupakan mereka. Pemimpin sebenarnya adalah abdi rakyat. (Saiful Falah: 2017, hlm. 2)

Sebagaimana kasus korupsi yang telah terjadi pada tanggal 06 Desember 2020 penangkapan seorang Menteri Sosial yang dilakukan di wilayah Jabodetabek. Kasus ini diungkapkan oleh ketua KPK bahwasanya penangkapan Menteri Sosial atas dasar penerimaan hadiah pada program BANSOS di Kemensos para vendor Jasa Pemerintahan dan Pengadaan barang dalam penanganan pandemi Covid-19. Secara umum, terbukti bahwa pemimpin memiliki aura karismatik, visi dan misi yang berbeda, kemampuan untuk mengarahkan apa yang dipimpinnya, dan keterampilan komunikasi tertentu. Di bidang lain, dapat dinyatakan bahwa keefektifan seorang pemimpin adalah orang yang mampu memodifikasi gaya kepemimpinannya dan beradaptasi dengan berbagai situasi. (Djazuli: 2017, hlm. 60.)

Pemahaman M. Natsir tentang pemimpin ideal bisa ditelusuri dari pernyataan nya saat memberikan ceramah umum di IKIP tentang kepemimpinan. Pemimpin ideal bukan sekedar bertanggung jawab terhadap rakyatnya dengan melaksanakan program untuk mensejahterakan mereka. Pemimpin yang ideal tidak hanya mencoba mengikuti aturan yang telah ditentukan untuk menunjukkan kepada dewan yang menunjuknya bahwa masa jabatannya dibenarkan. Wewenang tertinggi telah memberinya kepemimpinan sebagai



tugas ilahi. Pemimpin yang ideal, akibatnya, akan selalu merasa diperhatikan kemanapun dia pergi. (Saiful Falah; 2012, hlm. 91)

Nabi Muhammad SAW dalam proses politik sebagai pemimpin tertinggi yang banyak menaruh perhatian pada kaum kafir Quraisy mungkin menjadi penghambat pertama atas keberhasilan penyebaran Islam, keterlambatan tersebarnya ajaran Tauhid dengan watak keras kepala dengan disertai urusan ekonomi, politik, keagamaan, kebudayaan, kekuasaan sebagai pemegang peranan penting dalam mereka. (Muftisany, Hafidz; 2021, hlm. 32)

Madinah berfungsi sebagai negara jika ditinjau dari prespektif bagian-bagian penyusunannya kaum Muhajirin dan anshar sebagai rakyat, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya wilayah Madinah pemerintahannya Muhammad yang dibantu oleh umat Islam, hukum-hukumnya adalah Piagam madinah. Ajakan Rasulullah kepada para pemimpin bangsa atau wilayah lain, seperti Raja Heraklius, dimana Herakhilius mengatakan Muhammad adalah pemimpin Madinah. Madinah adalah bangsa jika dilihat dari bagian-bagian konstituen negara. (Nashria Tyas; 2019, hlm. 33)

Al-qur'an secara spesifik menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang diutus kepada semua umat manusia diseluruh dunia, ketika Rasul sebelum beliau diutus untuk suatu bangsa atau umat tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam terjemahan Surah Saba'(34) ayat 24:

"Katakanlah (Muhammad), 'Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?' katakanlah, 'Allah'. Dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata". (QS. Saba{34}:24)

Allah telah memilih mereka diantara semua ciptaan-Nya untuk mengemban tanggung jawab yang Agung, yaitu dapat dipercaya untuk mengungkapkan dakwah berbentuk wahyu serta risalah kepada seluruh hamba-Nya. Para Rasul diberi banyak bekal keutamaan serta keistimewaan, seperti kitab, mu'jizat dan sifat-sifat kemuliaan. (Sudirman Anwar, 2015, hlm. 03). Dalam Islam, teladan terbaik terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat-sifat yang selalu dibangkitkan dan dilindungi oleh Allah SWT.

Kriteria Pemimpin Ideal Menurut Para Ulama

Pertama, Imam Al-Muwardi; Memiliki pengetahuan yang memungkinkan ijtihad dalam hal-hal yang relevan seperti yang digariskan oleh undang-undang, Kesempurnaan panca indera—penglihatan, pendengaran, ucapan, dan tindakan yang sesuai, Tidak Kurang dalam area apa pun yang dapat menghambat pergerakannya, Memiliki wawasan yang luas yang dapat membantu ada keberanian dan kekuatan yang diperlukan untuk melindungi negara dan berjihad melawan musuh dalam memimpin rakyat dan melindungi kepentingan negara, berakhlak mulia. *Kedua*, Ibnu Hazm; Dewasa, Laki-laki, progresif, mendahului orang-orang yang bertakwa kepada Allah. *Ketiga*, Imam Syafi'i; merdeka, laki-laki, mujtahid, sehat indera, keadilan, dewasa. *Keempat*, Ibn Khaldun; ilmu pengetahuan,



keadilan, kemampuan, sehat jiwa dan fisik. Ibnu Hazm mengatakan bahwa Islam merupakan satu dari beberapa kriteria bagi para pemimpin pandangan ulama lain, tetapi al-Mawardi, Imam Syafii, dan Ibnu Khaldun tidak menyebutkannya. Prinsip para penguasa menurut pendapat para Ulama adalah sama. Perbedaannya terletak pada kebutuhan para Ulama untuk menentukan kriteria tertentu dan tidak menentukan kriteria lain, yang terkadang dianggap mendasar. (Fata; 2012, hlm. 1-15)

Macam-macam Teori Pemimpin

Pertama, Teori Genetis merupakan bahwa Pemimpin itu tidak ada, yang ditunjukkan dengan kenyataan bahwa Pemimpin hadir dalam keadaan dan kondisi yang sama-sama tidak normal. Secara khusus, teori ini bertumpu pada pandangan deterministik. Oleh sebab itu teori ini berasumsi bahwa tidak semua orang menjadi pemimpin berdasarkan sifat dan kemampuannya.

Kedua, Teori Sosial menyatakan bahwa pemimpin tidak dilahirkan seperti itu dan harus dipersiapkan, dididik, dan dibentuk. Jika mereka dipersiapkan atau dididik, dan jika mereka mau, semua orang bisa menjadi pemimpin.

Ketiga, Teori Ekologis/Sintetis, Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat berhasil menjadi pemimpin jika ia mempunyai bakat kepemimpinan sejak lahir, serta bakat kepemimpinan yang dikembangkan melalui pendidikan, pengalaman, bahkan tuntutan lingkungan dan ekologi. (Sintani; 2022, hlm. 19)

Dasar Pengangkatan Pemimpin

Agama Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya kewajiban untuk mengangkat seorang pemimpin. Keberadaan pemimpin sebagai leadership dalam kehidupan rakyatnya dijelaskan secara detail dalam Islam. Melihat pentingnya keberadaan seorang pemimpin, para ulama berfatwa tentang kewajiban mengangkat pemimpin. Mayoritas ulama sepakat perihal wajibnya mengangkat seorang pemimpin, namun mereka berbeda tentang dasar kewajiban. Mayoritas ulama mengatakan kewajiban ini berdasarkan perintah syariat Islam, sementara menurut kelompok syi'ah, dasar kewajibannya adalah analogi akal. Namun Imam Hasan Al-Bashri mengumpulkan dasar keduanya dengan pendapat bahwa kewajiban ini didasarkan oleh perintah syariat dan kebutuhan pemimpin dalam kehidupan manusia secara analogi akal. Berikut beberapa dalil kewajiban pengangkatan pemimpin:

Pertama, Dalil Al-Qur'an, legilitas pemimpin juga dikatakan oleh dalil Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam terjemahan Surah An-Nisaa{04}:59):

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berada pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah SWT. (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS.An-Nisaa{04}:59).



Umat Manusia selalu diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu menaatinya-Nya, Rasulullah SAW dan ulil amri disebutkan diantara mereka. Istilah ulil amri memiliki banyak arti diantaranya ulama, hikmah dan penguasa yang adil.

Kedua, Dalil Hadits perintah mengangkat pemimpin, juga disampaikan secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW:

“Ketika terdapat tiga orang keluar untuk berpergian, maka hendaklah salah satu dari mereka diangkat menjadi pemimpin” (HR. Imam Abu Daud)

Hadits ini menjelaskan bahwa setiap tugas dari tiga orang atau lebih, untuk menunjuk seorang pemimpin yang pasti akan memerintah dalam segala hal adalah solusi terbaik untuk melindungi diri dan ide yang berbeda menjadi bibit dari perpecahan. (Syafiyurrahma; 2016, hlm. 295)

Ketiga, Dalil Ijma Ijma’ merupakan salah satu sumber syariat Islam yang keberadaannya seperti nas syariat. Pemahaman para sahabat terhadap Islam, menjadi tolak ukur bagi generasi muslim selanjutnya. Mereka sepakat tidak ada penerus Nabi Muhammad SAW sebagai amirul mukminin, yang dibuktikan dengan diangkatnya para khulafa ar-rasyidiin. (Tim Soko Papat; 2021, hlm. 88)

Keempat, Dalil Ushul Fiqh, Ushul fiqh merupakan pedoman keilmuan yang terdapat dari kaidah untuk pembuatan hukum dengan bersumber Al-Qur’an dan Hadits. Ushul fiqh juga sebagai pedoman untuk mengeluarkan serta mensosialisasikan kaidah-kaidah madzhab ulama. Kewajiban menjunjung tinggi syariat Islam dan keberadaan seorang pemimpin sebagai kelompok berhak memaksakan dan memeliharanya, menjadikannya kewajiban untuk mengangkat seorang pemimpin. (Moh Mufid; 2018, hlm. 41)

METODE PENELITIAN

Metodelogi penelitian yang peneliti pakai dengan metode kualitatif. Metodelogi kualitatif merupakan metode yang memungkinkan peneliti melihat pengalaman secara detail, dengan menggunakan metode tertentu seperti observasi, analisis isi, metode virtual dan biografi. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi masalah dari sudut pandang peneliti dan memahami makna dan interpretasi yang digunakan dalam tindakan peristiwa atau objek. (Cosmas gatot; 2020, hlm. 37)

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. Penelitian kepustakaan dapat didefinisikan sebagai penelitian yang berfokus pada penelitian dan diskusi bahan pustaka, seperti buku, kitab, dan jurnal, yang berkaitan dengan subjek penelitian, atau penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber informasi. Terlepas dari fakta bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, tujuan penulis adalah untuk menunjukkan dan menjelaskan ide-ide Imam Al-Ghazali. Selain melakukan metode kepustakaan dapat memakai sumber primer dan sumber sekunder, peneliti skripsi penelitian kualitatif yang dikembangkan menurut metode ilmiah.



Pertama, Sumber Data Primer adalah untuk mencapai tujuan pengumpulan literatur tentang masalah yang diteliti, bahan penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dikelompokkan berdasarkan referensi utama. Kemudian sumber data ini dari karangan Imam Al-Ghazali yang masih terkait dengan pemimpin dan yang masih terkait pada penulisan, yaitu: *At-Tibru al-Masbuk fi Nasihati al-Mulk*.

Kedua, Sumber Data Sekunder penulisan ini diambil dari sesuai karya-karya yang masih relevan seperti tesis, disertasi, skripsi, buku maupun artikel-artikel yang masih berkesinambungan pada tema pembahasan peneliti. Analisis isi, juga dikenal sebagai "analisis isi", adalah jenis penelitian yang menampilkan diskusi menyeluruh tentang informasi yang ditulis atau tercetak di media. Harold D. Lasswell adalah pelopor analisis isi dan pencipta teknik simbol coding, seperti: pencatatan sistematis simpol atau pesan dan interpretasinya. (*Irfan taufan; 2019, hlm. 01-13*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Imam Al-Ghazali, seorang pemimpin yang ideal pada dasarnya dapat mempengaruhi. Para pemimpin ini berpengaruh atau memiliki sosial yang signifikan. Tidak disebutkan bahwa seorang pemimpin tidak mampu mempengaruhi atau pengaruh posisi mereka dimata dan hati individu. (*Masykur Hakim; 2018, hlm. 38-56*)

Memberikan pengaruh karena nilai-nilai luhurnya, seperti intelektualisme yang luas, pemahaman agama yang mendalam dan akhlak yang mulia. Pemimpin Imam Al-Ghazali, memiliki cara berpikir tertentu dan syarat pemimpin utama yang dapat mempertahankan posisi pemimpin. Imam Al-Ghazali menekankan kekuatan hati dalam pokok keimanan dan pokok keadilan akhlak sebagai alat untuk belajar. Karena akhlak muncul tanpa mempertimbangkan akal atau panca indera, hati mampu menentukan sikap dan tindakan seseorang yang dikategorikan sebagai akhlak. (*Ahmad Busroli; 2019, hlm. 71*) Keberhasilan seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinannya. Target organisasi tidak dapat dicapai secara efisien dan efektif tanpa kepemimpinan yang baik dan keterampilan. Di sini, kepemimpinan dianggap sebagai bagian penting dari manajemen dan sangat penting dalam operasi perusahaan baik di sektor publik maupun swasta. (*Aries Djaenuri; 2015, hlm. 63*)

1. Pemimpin Ideal Dalam Kriteria Nabi Muhammad SAW

Allah telah memilih mereka diantara semua ciptaan-Nya untuk mengemban tanggung jawab yang Agung, yaitu dapat dipercaya untuk mengungkapkan dakwah berbentuk wahyu serta risalah kepada seluruh hamba-Nya. Para Rasul diberi banyak bekal keutamaan serta keistimewaan, seperti kitab, mu'jizat dan sifat-sifat kemuliaan. Dalam Islam, teladan terbaik terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat-sifat yang selalu dibangkitkan dan dilindungi oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam terjemahan Surah Al-Ahzaab(33) ayat 21:

"Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah." (QS. Al-



Sifat wajib Rasul ini merupakan cerminan dari karakteristik Nabi Muhammad SAW dan pelaksanaan tugasnya sebagai pemimpin umat. Sebagaimana dibawah ini dirincikan:

Pertama, As-Shiddiq. As-Shiddiq yaitu jujur, berintegritasi tinggi yang terjaga dari kesaalahan, bertindak berdasarkan hukum dan peraturan. Nabi Muhammad SAW dipuja oleh semua orang karena sifatnya yang banyak serta berhubungan dengannya dan menerima pemujaan para pengikutnya. Ketika beliau masih muda, semua Quraisy menyebutnya sebagai Shiddiq dan Al-Amiin. Seluruh orang, termasuk para pemimpin Mekkah sangat menghargai dan menghormati beliau.

Kedua, Amanah Seorang pemimpin, Nabi Muhammad SAW amat mengawasi kebutuhan umat manusia, mendengarkan kebutuhan dan keluhan masyarakat serta memantau potensi masyarakat mulai dari potensi alamnya hingga potensi manusianya. Semua ini pada akhirnya bersumber sesuai kegiatan ajakan yang dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya dibidang profesionalisme dan keimanan serta ketakwaan dalam memperjuangkan dengan mengembangkan kualitas manusia.

Ketiga, Tabligh Metode dan cara-cara tabligh Nabi Muhammad dengan keluarga sebagai prioritas pertamanya sebelum berdakwah kepada semua orang. Dia yang pertama kali melakukan sesuatu sebelum mengajarkannya. Sudah menjadi sifat Rasulullah untuk tidak menyembunyikan informasi penting, terutama yang berkaitan dengan kemaslahatan agama dan umat manusia, dia tidak pernah menyembunyikan informasi penting untuk dirinya sendiri. Beliau biasanya berbagi cerita menggembirakan tentang keunggulan dan pencapaian masa depan bagi para pengikutnya. Beliau sangat tegas kepada orang yang tidak mematuhi peraturan Tuhan, akan tetapi, untuk memaafkan ketika ada kesalahan langkah yang termasuk dirinya sendiri.

Keempat, Fathanah. Nabi Muhammad yang dianugerahkan kecerdasan oleh Allah SWT berhasil sebagai pemimpin umat karena kemampuan atletis dan kepemimpinannya yang luar biasa. Kecerdasan bukan sekedar diperlukan agar mengetahui dan menjelaskan wahyu Allah SWT, akan tetapi, juga disediakan oleh fakta bahwa ia memperoleh keyakinan Allah SWT untuk memimpin manusia dan bahwa agama Islam diadakan kepada semua umat dan rahmat bagi seluruh alam.

Sebab itu, diadakan seorang pemimpin yang bijaksana yang dapat membantu umatnya memahami firman Allah SWT dengan menghasilkan petunjuk, bimbingan, pendapat dan pandangan. Bisa dikatakan bahwa pikiran Nabi Muhammad SAW tidak pernah tersentuh sama sekali oleh ajaran manusia, sesuai dengan kesaksian sejarah, bukti-bukti Al-Qur'an dan berbagai petunjuk yang diambil dari sejarah Islam. Beliau adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca atau menulis. (*Inayatul Ulya: 2016, hlm. 113*)

2. Pemimpin Ideal Dalam Buku Indonesia Berkhilafah

Dalam upaya untuk memiliki pemimpin yang baik dan mampu bekerja secara efektif, Islam mengatur kondisi yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin.



Dikemukakan dalam buku Indonesia Berkhilafah bahwa seorang pemimpin sebagai berikut: a) adil, Keadilan merupakan kualitas yang menunjukkan pemahaman agama yang kuat dan karakter kepemimpinan. Keadilan dapat ditunjukkan ketika seorang penguasa dapat menegakkan hukum rakyat, menghindari apa yang dilarang oleh agama, dapat memikul beban yang berat, berani, bijaksana dalam situasi apa pun, dan melakukan hal-hal yang melindungi martabat agama dan dunia. Secara umum, keadilan penguasa dapat ditentukan oleh kegigihannya dalam menjalankan hukum Islam. (*Al-Mawardi; 2020, hlm. 04*), b) pengetahuan setingkat Muftahid, kedudukan pemimpin yang mengemban tugas mengatasi segala persoalan, menuntutnya memiliki ilmu yang membuatnya mumpuni untuk ijtihad berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan kemampuan menganalisis disposisi syariah menjadi syarat dan ketentuannya. c) sehat jasmani dan rohani, seorang pemimpin haruslah orang yang memiliki indera pendengaran, penglihatan dan lisan. Persyaratan ini penting bagi seorang pemimpin, karena kesehatan indera memungkinkannya melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. d) integritas *leadership*, yang dimaksud dengan situasi ini adalah integritas pemimpin dalam menciptakan nilai bagi kesejahteraan rakyat, negara, kemajuan dan perkembangannya tergantung pada pemimpin yang bijaksana, cermat dan terukur dalam mengambil setiap keputusan, dan secara otoritas. menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. e) jiwa Nasionalisme, komponen penting untuk membentuk jati diri seorang pemimpin yang amanat dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan.

3. Analisis Konsep Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Imam Al-ghazali

Dalam kitab At-Tibru Masbuk Fii Nashihati Al-Muluk menyatakan sadarilah dan percayalah bahwa Allah memilih dua kelompok manusia. Kelompok pertama, nabi menunjukan kepada orang-orang bagaimana menyembah Allah dan mengenal Allah. Kelompok kedua, para penguasa yang diberi mandat oleh Allah untuk mencegah kezaliman diantara makhluk-Nya. Karena Allah memberi mereka wewenang untuk menghukum mereka, keputusan harus didasarkan pada kepentingan rakyat sebab Allah memberi penguasa posisi tinggi diantara makhluk ciptaan-Nya melalui kehendak dan kuasa-Nya, seperti yang tertulis, "Penguasa-Penguasa adalah naungan Allah di dunia bagi makhluk-makhluk-Nya". (*Imam Al-Ghazali; 1988, hlm. 43*)

Penguasa yang merupakan pertanda kehancuran tidak akan bertahan lama dibawah pemerintahannya dan tidak kekal, penguasa yang adil adalah penguasa yang adil bagi rakyatnya dan memusnakan kezaliman diantaranya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim tidak akan berlangsung lama. Karena Nabi SAW bersabda: kekuasaan akan terus berlanjut walau bersama kekufuran sedangkan kekuasaan tidak akan berlanjut dengan kezaliman"

Imam Al-Ghazali berkata: "kezaliman ada dua. Pertama, kezaliman penguasa atas rakyatnya, kezaliman orang kuat atas orang yang lemah, kezaliman orang kaya terhadap orang miskin. Kedua, kezaliman atas dirimu sendiri, yaitu dengan melakukan



kemaksiatan. Maka janganlah engkau berbuat zalim agar kelak engkau tidak dizalimi”

Penguasa yang adil tidak ingin rakyatnya menderita sebagai akibat dari kezaliman dan tidak akan menganiyaya mereka. Karena mereka sadar bahwa sistem zalim tidak akan diterima oleh rakyat, dan bahwa suatu negeri akan hancur jika dipimpin oleh para pemimpin zalim. Mereka tidak akan menerima dizalimi, kePenguasaan akan kehabisan makanan dan rakyatnya pun akan melarikan diri serta tidak akan mematuhi kepemimpinannya sampai orang-orang menggulingkannya. Penguasa tidak akan pernah lagi menikmati kekuasaannya dan kePenguasaannya akan segera hancur berantakan. Dikatakan bahwa kedamaian dan rasa terima kasih kepada Penguasa menjadi ciri setiap bangsa yang makmur. Seorang pemimpin mempunyai tugas serta tanggung jawab yang berat dan mulia. Oleh sebab itu, seorang pemimpin menurut Imam Al-ghazali harus mempunyai syarat sebagai berikut:

a. **Pokok Keimanan**, iman adalah komitmen keagamaan yang terlihat dalam tindakan atau perilaku umat beragama, iman sering dikaitkan dengan agama. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa hati manusia mengandalkan iman sebagai pembenaran yang kuat, bahwa tidak ada ruang untuk keraguan dan bahwa tidak akan pernah ada kesalahan. (*DJamaluddin; 2015, hlm. 80*). Kemungkinan untuk menyebut seorang beriman dimata Allah jika mereka memiliki pembenaran seperti itu didalam hati mereka. Pengalaman ajaran agama adalah pelengkap yang dapat membuat iman yang ada lebih atau kurang sempurna, terlepas dari kenyataan bahwa pengakuan lisan merupakan penegasan Islam dan iman disisi makhluk.

b. **Pokok Keadilan. Dalam keadilan**

- 1) Tidak Berbuat Dzalim, Engkau harus mengetahui kedudukan kekuasaan karena memang kekuasaan merupakan nikmat dari Allah SWT. Barang siapa yang memenuhinya, ia memperoleh kebahagiaan yang tiada akhir, dan tidak ada kebahagiaan besar kecuali kebahagiaannya. Barang siapa yang menenuaikan kekuasaan ini dengan kelalaian dan meremehkan perbuatan baik orang lain, maka ia akan mendapatkan kesengsaraan yang tidak ada setelahnya, melainkan kufur kepada Allah. Penguasa memang kekuasaan yang ancaman besar, pembahasaannya luas dan penjelasannya panjang. Tidak akan ada penguasa jika dia memperlakukan seorang ulama yang mengajarnya jalan yang benar sebagai seorang teman dan mengetahui bahaya dalam hal ini.
- 2) Dekat dengan ulama, Dekat dengan ulama, pembahasannya sangat luas dan penjelasannya sangat panjang, namun seorang penguasa atau pemimpin sebenarnya adalah ancaman yang sangat besar. Seorang penguasa tidak akan bertahan kecuali ia berteman dengan seorang ulama yang mengajarkan keadilan dan sadar akan risiko yang terlibat. Hikayat Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya alasan taubatnya dan dia menjawab: “sekali aku memukul seorang budak, maka ingatlah bahwa setelah malam ini, pagi akan menjadi hari kiamat.’ Umar berkata “kata-kata itu berpengaruh dihati saya”.
- 3) Mendidik, Jangan bangga karena hanya terlepas dari kezaliman, akan tetapi Penguasa dapat mendidik anak-anak, kawan, pegawai dan wakilnya. Tetapi ia tidak dapat lepas daari suatu kezaliman. Hati-hatilah engkau dari



menyepelkan mereka karena menjadikanmu teladan, sesungguhnya permissalammu adalah seperti hewan tunggang, jika ia melihat sebuah kebun yang hijau maka ia akan memakannya sampai ia menjadi gemuk, dan karena kegemukannya ia disembelih dan dimakan.” Menurut Imam Al-Ghazali, dijalan mulia menuju Allah, ilmu dan akal adalah nilai agama, sedangkan ilmu diperoleh melawati rasa (zawq) dan pengetahuan ibadah yang akan menghantarkan manusia kepada suatu hasil tertentu.

- 4) Jangan sombong, biasanya para penguasa merupakan seorang yang sombong, sedangkan kesombongan akan mengantarkan kepada kekejaman, sedangkan kemarahan adalah penyakit dan musuh sebuah sifat kebajikan dan hal itu sudah kita bahas dalam kitab *Al-Muhlikat*. Jika sang penguasa pemarah, maka ia harus membiasakan menjadi seorang yang pemaaf, dermawan, dan pemurah. Apabila dia terbiasa dengan sifat itu semua, maka ia menyerupai para nabi dan para wali, namun sebaliknya jika sifat pemarah menjadi kebiasaannya maka ia seperti hewan buas.
- 5) Jangan berkhianat, jadikanlah dirimu seolah seorang rakyat, dan jadikanlah rakyatmu seperti seorang raja, setiap perbuatan yang engkau tidak ridhai menimpah atas dirimu, maka engkau juga tidak ridha terjadinya hal seperti itu kepada rakyat. Ketika pemimpin membiarkan hal itu menimpa rakyatnya, maka telah berkhianat dan telah berbuat curang kepadanya.
- 6) Jangan mengabaikan kebutuhan masyarakat, Janganlah engkau mengabaikan orang-orang yang mempunyai hajat berdiri di depan pintumu, berhati-hatilah dari akibatnya, jika seorang datang kepadamu membutuhkan sesuatu maka janganlah kamu tunda dengan shalat Sunnah, karena menyelesaikan kebutuhan kaum Muslimin lebih penting dari shalat Sunnah. Lakukanlah dengan bersungguh-sungguh sehingga mereka ridha padamu sesuai dengan tuntunan syariat.
- 7) Jangan serakah, sebagaimana seorang pemimpin jangan biasakan untuk memanjakan syahwat atau keinginannya dengan memakai pakaian yang mewah, makanan yang berlebihan, namun gunakanlah kecukupan dalam segala hal sebab tidak ada keadilan tanpa adanya qana’ah (rasa cukup).
- 8) Tidak otoriter, jangan Berbuat Kasar dan mudah marah kepada rakyatnya untuk melakukan sesuatu dengan lemah lembut. Setiap pemimpin yang tidak berlemah lembut kepada rakyatnya, maka Allah tidak akan berlemah lembut kepadanya. Para penguasa banyak dari mereka yang murka terhadap orang-orang yang tidak disukai, banyak dari mereka memaki, dan bahkan membunuh orang yang tidak mereka suka. *“Ada tiga sifat siapa yang memiliki sifat ini maka telah sempurna keimanannya, yakni yang menahan amarahnya, berlaku adil dalam keadaan ridhanya dan keadaan marah, dan memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya walaupun sebenarnya ia mampu untuk membalasnya”*.
- 9) Mencintai agamanya, Wajib bagimu untuk bersungguh-sungguh dalam melayani rakyatmu, sehingga mereka ridha padamu sesuai dengan tuntunan syariat. Sebaik-baiknya umatku adalah yang mereka (rakyat) mencintai kaliann dan



kalian (penguasa) mencintai rakyatnya, dan sejelek-jeleknya umatku adalah yang mereka (rakyat) murka kepada kalian dan kalian murka kepada mereka (rakyat), mereka melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Dan wajib bagi seorang penguasa untuk tidak tertipu dengan pujian dan prestasi yang dia capai, dan janganlah berkeyakinan bahwa rakyatnya sudah ridha kepadanya, adapun orang yang memujimu pada hakikatnya ia takut kepadamu, seorang raja seharusnya mengutus utusan untuk mengetahui apa yang rakyat tidak suka pada dirinya, agar ia mengetahui kekurangan kepemimpinannya.

- 10) Tidak mencari keridhaan rakyat yang tidak sesuai dengan syariat, Hendaknya tidak mencari keridhaan manusia dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, karena siapa yang murkanya bukan karena syariat, maka murkanya tidak berarti sedikitpun.

4. *Collaborative Governance* Dalam Pemberantasan tindak Kasus Korupsi di Indonesia

Karena cakupannya yang luas, korupsi merupakan fenomena yang sulit untuk didefinisikan secara tepat dan komprehensif. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi (*misuse of public office for private gain*). (Budi Setiyono; 2023, hlm. 233). Sebagian besar para ahli setuju bahwa korupsi adalah penyalahgunaan sumber daya dan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Menggunakan kekuasaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan permainan. (Agus Hendrayady; 2022, hlm. 65)

Secara umum, penegakan hukum berkonsentrasi pada penegakan hukum pidana dan pencegahan kejahatan (*prevention of crime*), dengan tujuan mencegah terjadinya tindak pidana. Pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan moral bangsa dan menggunakan strategi perlindungan masyarakat yang luas. (Bening; 2019, hlm. 15)

Pemberantasan tindak pidana kasus korupsi, Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang paling penting adalah menyadarkan dan mempromosikan bahwa korupsi merugikan dan salah karena mengambil keuntungan secara tidak etis dari kerugian orang lain. Selain itu, diperlukan formula politik untuk memberantas korupsi dengan cara preventif, investigasi, dan represif. (Much Arif Saiful anam; 2016, hlm. 368). 1) *Preventif strategi*, berusaha untuk menghindari korupsi dengan menghilangkan atau mengurangi elemen atau kemungkinan yang menyebabkan korupsi. Mewujudkan aturan etis untuk sektor publik, meningkatkan manajemen sumber daya manusia, meminta laporan perencanaan strategis dan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan meningkatkan nilai upaya antikorupsi di tingkat nasional adalah beberapa contoh strategi preventif. 2) *strategi detektif*, Tujuannya adalah menemukan korupsi. Sebagai contoh, Indonesia dapat menggunakan pendekatan detektif, seperti meningkatkan sistem pengaduan masyarakat, memperketat kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, dan berpartisipasi dalam gerakan internasional anti korupsi dan anti pencucian uang. 3) *strategi represif*, dirancang untuk memerangi atau menghilangkan korupsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satu cara untuk menerapkan strategi represif adalah dengan membentuk badan atau komisi antikorupsi,



melakukan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan menghukum pelaku korupsi besar. Selain itu, ada sistem pemantauan yang dibuat untuk menangani kejahatan tindak pidana korupsi secara menyeluruh, mempublikasikan kasus-kasus korupsi dan menganalisisnya.

Strategi preventif, detektif, dan represif dapat diterapkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Strategi tersebut, bagaimanapun, membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan komitmen dari berbagai lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus disertakan dengan pelaksanaan strategi tersebut agar tindakan nyata dapat diambil dan dilaksanakan sesegera mungkin. Pemerintahan Kolaboratif, juga dikenal sebagai pemerintahan kolaboratif, dapat digunakan sebagai dasar untuk kebijakan pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Collaborative Governance Dalam pemberantasan tindak kasus korupsi, menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan oleh lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat saat bekerja sama untuk memerangi korupsi sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Menurut Ansell dan Gash, Collaborative Governance adalah pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pihak-pihak non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, konsensual, dan konsultatif untuk menetapkan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program—program publik atau properti. (Warsono hardi; 2020, hlm. 34)

Model Collaborative Governance terdiri dari beberapa langkah-langkah seperti berikut: a) *starting condition*, Pada tahap awal hubungan antara stakeholder, masing-masing pihak memiliki latar belakang yang berbeda, yang dapat menyebabkan asimetri dalam hubungan yang telah dibentuk. Kondisi awal kolaborasi dapat membantu atau menghalangi kerja sama antara pemangku kepentingan dan lembaga. Dalam hal ini, pemahaman tentang latar belakang sejarah para pihak yang terlibat dalam pemberantasan korupsi (KPK, POLRI, lembaga peradilan), serta tugas dan wewenang mereka harus dibangun sedemikian rupa sehingga tidak ada konflik dan setiap pihak dapat menemukan cara untuk bekerja sama dengan baik. b) *Facilitative Leadership*, mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif: manajemen yang melindungi proses kolaborasi, pengelolaan kapasitas pelaksanaan teknis, dan kredibilitas. Semua ini memastikan bahwa kolaborasi memiliki peluang untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua pemangku kepentingan. Pelaksanaan kerja sama sangat dipengaruhi oleh kemampuan, komitmen, dan kemauan politik seorang pemimpin untuk memimpin lembaga yang dipimpinnya untuk bekerja sama dengan lembaga lain. Selain itu, pemimpin lembaga yang memiliki hubungan langsung dengan penghapusan korupsi, seperti KPK, POLRI, pengadilan, kepala daerah, legislator, dan pemimpin asosiasi pengusaha swasta diharapkan dapat mengelola hubungan komunikasi dengan pimpinan lainnya, mengurangi resiko penyalahgunaan dan meningkatkan kesempatan kerjasama dan tidak merugikan kepentingan pihak tertentu. c) *institutional Design*, menjelaskan bahwa legitimasi prosedural dari proses kerja sama paling ditekankan secara kritis dalam kaitannya dengan protokol dasar dan aturan dasar kerja sama. Dalam proses kolaboratif, harus ditekankan bahwa pengurus harus terbuka dan inklusif. Dalam memberantas korupsi, perlu disepakati suatu sistem yang mengatur hubungan antar instansi terkait,



pemerintah daerah dan swasta sesuai dengan peran, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak. Pembentukan struktur dan strategi otoritas yang jelas diharapkan dapat membantu mencapai tujuan antikorupsi. d) *collaborative process* model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai *fase* perkembangan.

KESIMPULAN

Maka berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Seorang pemimpin menurut secara Islam, bahwasanya kriteria pemimpin ideal, yaitu: memiliki pengetahuan, kesempurnaan panca indera, kemampuan, dewasa, laki-laki, progresif, merdeka, keadilan, mendahului orang yang bertaqwa. Ibnu Hazm mengatakan Islam merupakan satu dari beberapa kriteria bagi para pemimpin pandangan ulama lain, tetapi Al-Mawardi, Imam Syafi'i, dan Ibnu Khaldun tidak menyebutkannya.
2. Konsep pemimpin ideal dalam perspektif Imam Al-Ghazali adalah seorang pemimpin mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat dan mulia. Karenanya, seorang pemimpin menurut Imam Al-ghazali harus menyesuaikan syarat sebagai berikut:
 - a. Pokok keimanan, Iman adalah komitmen keagamaan yang terlihat dalam tindakan atau perilaku umat beragama, iman sering dikaitkan dengan agama.
 - b. Pokok keadilan, tidak berbuat zalim, dekat dengan ulama, mendidik, jangan sombong, jangan berkhianat, jangan mengabaikan kebutuhan masyarakat, jangan serakah, tidak otoriter, mencintai agamanya, tidak mencari keridhaan rakyat yang tidak sesuai dengan ajaran syariat.
3. Collaborative governance dalam pemberantasan tindak kasus korupsi di Indonesia yang dibutuhkan kerjasama terstruktur antara institusi pemerintah, swasta dan masyarakat dengan mencapai *personal dialog, trust building, commitment to the process, mutual understanding, intermediate results* untuk sampai pada pemahaman bersama mengenai *output* yang ingin sesuai saat mengatasi tindakan korupsi. Selain itu, sangat penting bagi para pemimpin untuk memiliki kemampuan, komitmen, dan keinginan politik untuk bekerja sama dengan lembaga lain dalam upaya memberantas tindakan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *"Ar-Rahiq Al-Makhtum-Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad Salallahu'alaihi Wasalam"*, (Jakarta: Qisthi Press), 2016
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Kitab At-Tibru Masbuk Fii Nashihati Al-Muluk*, (Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah), 1998
- , *Kitab At-Tibru al-Masbuk fii Nashihati al-Muluk*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah), 1998 terjemah Aminullah Furqan, *Kitab Leadership*, (Depok: Keira), 2021,



- Al Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah), 2020.
- Djamaluddin, Mahbub, *Imam Al-Ghazali Sang Ensiklopedi Zaman*, Cet. I, (Jakarta: Senja Publishing), 2015.
- Djaenuri, Aries. *Kepemimpinan, Etika dan Kebijakan Pemerintah*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2015
- Djazuli, *Fiqh Siyasah, and Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu. "Syariah."* Cet. ke-5, (Jakarta: Kencana), 2017.
- Falah, Saiful. *Rindu Pendidikan Dan Kepemimpinan M. Natsir* (Republika Penerbit:), 2012.
- Agus Hendrayady and others, *Pendidikan Budaya Anti Korupsi* (Padang: Get Press), 2022,
- Haryono, Cosmas Gatot Haryono. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, Cet.I, (Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI), 2020.
- Mufid, Moh. *"Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi"*, Cet.II (Jakarta: Kencana), 2018.
- Muftisany, Hafidz, *Keteladanan Pemimpin Dalam Islam*, (Intera), 2021
- Setiyono, Budi. *Birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi*. (Bandung: Nuansa Cendekia), 2023.
- Sintani, Lelo, Dkk. *Dasar Kepemimpinan*. (Tangerang: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri), 2022.
- Tim Soko Papat, "Indonesia Berkhilafah (Rekontruksi dan Representasi Hakikat Negara Dalam Islam", Cet.1, (Kediri: Lirboyo press), 2021
- Widodo, Joko, *Learning Organization Piranti Pemimpin Visioner*, Cet. 1 Edisi Revisi (Malang: Media Nusa Creative Publishing), 2022.
- Arif Saiful, Much and M Arif (2019), Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Wahana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.03 No.02
- Bening Hadilinatih (2019), Collaborative Governance Dalam Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Enersia Publika*, Vol. 02 No. 01
- Busroli, Ahmad (2019). Pendidikan akhlak Ibnu Miskawaih dan Imam al-Ghazali dan relevansinya dengan pendidikan karakter di Indonesia, *At-Tarbiyah*, Vol. 10 No.02.
- Fata, Ahmad Khoirul (2012). Kepemimpinan dalam perspektif pemikiran politik Islam, *Jurnal Review Politik*, Vol.02 No.01.
- Hardi, Warsono (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik, *Journal E-Sospol*, Vol. 04 No. 01.
- Hakim, Masykur (2018). Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Ghazali, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 05 No. 01.
- Inayatul Ulya (2016). Radikalisme Atas Nama Agama: Tafsir Historis Kepemimpinan Nabi Muhammad Di Madinah, Addin, Vol.10 No.01.



- Latifah, Milahtul, And Hilmi Zakiyyah. "Pengaruh Kepemimpinan Demokratis Terhadap Motivasi Kerja Guru Di Smpit Cendekia Muslim Bogor." *Tadbiruna* 1.2 (2022): 72-82.
- Rofi'i, Ahmad (2021). Hukum Memilih Pemimpin Muslim Yang Didanai Oleh Orang Kafir (Studi Fikih Kontemporer). *Jurnal Ahkam*, Vol. 02 No.01.
- Falah, Saiful. "Pendidikan Kepemimpinan M. Natsir dan Implementasinya di Lembaga Pendidikan." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 4.08 (2017): 17.

